



Restrukturisasi Nomenklatur Birokrasi pada Penggabungan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga di Lampung Timur

INFO PENULIS

Sudarman Mersa
Universitas Dharma Wacana
mersadarma454@gmail.com
+628127978296

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Mersa, S. (2024). Restrukturisasi Nomenklatur Birokrasi pada Penggabungan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga di Lampung Timur. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 514-519.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan dampak restrukturisasi nomenklatur birokrasi melalui penggabungan Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Lampung Timur. Kebijakan penggabungan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi serta penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas penyelenggaraan program, dan disiplin aparatur melalui pembagian tugas yang lebih terstruktur dan penerapan SOP yang konsisten. Integrasi dua bidang urusan juga mendorong kolaborasi program serta penyederhanaan alur koordinasi, meskipun proses adaptasi menghadapi tantangan berupa perbedaan budaya organisasi, ketidaksesuaian kompetensi, dan komunikasi internal yang perlu diperkuat. Secara keseluruhan, penggabungan dinas memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan kapasitas aparatur, manajemen perubahan, serta konsistensi implementasi kebijakan restrukturisasi.

Kata Kunci, Restrukturisasi, Efisiensi kinerja, Efektivitas.

Abstract

This study aims to analyze the process and impact of bureaucratic nomenclature restructuring through the merger of the Tourism Office and the Youth and Sports Office in East Lampung Regency. This merger policy is part of the broader implementation of bureaucratic reform and organizational restructuring mandated by Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Apparatus. The research employed a qualitative descriptive approach using in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the organizational restructuring improved work efficiency, program effectiveness, and staff discipline through clearer task distribution and consistent implementation of standard operating procedures. The integration of the two sectors also enhanced program collaboration and simplified coordination flows, although the adaptation process encountered challenges such as differences in organizational culture, competency gaps, and the need for stronger internal communication. Overall, the merger had a positive impact on bureaucratic performance and public service delivery, yet its long-term success depends on strengthening staff capacity, effective change management, and the consistent implementation of restructuring policies.

Keywords: Restructuring, Performance Efficiency, Effectiveness.

A. Pendahuluan

Reformasi birokrasi sudah menjadi keharusan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi (H. Rahman, 2024). Reformasi birokrasi benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia (Shoimuna, 2024). Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun *good governance*, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi dibidang politik, ekonomi, dan hukum (Fitriani, 2022). Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan *clean government* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yasa et al., 2021). Melalui reformasi ini, pemerintah berusaha menata kembali struktur organisasi, memperjelas fungsi, serta meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal (Hartati, 2020). Sejalan dengan semangat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa perangkat daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan adanya regulasi ini, penataan organisasi perangkat daerah *including* perubahan nomenklatur, penggabungan dinas, maupun restrukturisasi fungsi menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi untuk memastikan efektivitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjadi pedoman terbaru untuk Pemerintah Daerah dalam rangka penataan kelembagaan OPD berdasarkan asas efisien, efektif dan logis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing (Suprianto, 2019). Pada Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa definisi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pelaksanaan otonomi Daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif Kepemudaan dan Olahraga, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Legislatif Lampung Timur mengusulkan penggabungan beberapa dinas Pemerintahan Lampung Timur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana kebijakan pemerintah pusat. Dua dinas diantaranya, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pariwisata digabung menjadi Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga.

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan publik (Setiawan et al., 2024). Dinamika kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan turunan lainnya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan. Dalam konteks ini, penggabungan beberapa dinas atau unit kerja menjadi langkah strategis yang lazim ditempuh sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi birokrasi, rasionalisasi anggaran, dan penyederhanaan proses administrasi (A. dan R. B. Rahman, 2019). Di Lampung Timur, kebijakan penggabungan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi salah satu contoh konkret dari upaya restrukturisasi nomenklatur birokrasi tersebut.

Sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga merupakan tiga bidang strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah (Kurniawan, n.d.). Pariwisata menjadi sektor unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat identitas lokal (Eko & Sri, 2020). Sementara itu, bidang kepemudaan dan olahraga berfokus pada pengembangan generasi muda serta peningkatan prestasi olahraga yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia (Wahyudi, 2024). Penggabungan ketiga bidang ini ke dalam satu nomenklatur

dinas diharapkan dapat menciptakan sinergi kebijakan, memperpendek rantai koordinasi, serta mengoptimalkan perumusan program pembangunan secara komprehensif. Namun demikian, integrasi fungsi yang berbeda ini tidak selalu berjalan mulus, karena memerlukan penyesuaian struktur organisasi, budaya kerja, dan tata kelola yang lebih terarah. Penggabungan Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Lampung Timur memunculkan berbagai dinamika birokrasi yang menarik untuk diteliti, terutama terkait penataan ulang tugas dan fungsi, distribusi kewenangan, serta reorganisasi sumber daya manusia. Pada tataran implementasi, perubahan nomenklatur seringkali memunculkan tantangan seperti tumpang tindih tugas, ketidaksesuaian kompetensi aparatur, hingga kesulitan dalam integrasi perencanaan program dan penganggaran. Selain itu, persepsi para pemangku kepentingan internal maupun eksternal terhadap perubahan struktur tersebut menjadi variabel penting dalam keberhasilan reorganisasi. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menjadi relevan untuk menggali lebih dalam bagaimana proses penyatuan dua bidang yang memiliki orientasi berbeda ini diterapkan dalam praktik pemerintahan daerah.

Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata berbasis alam dan budaya serta basis kepemudaan yang kuat, Lampung Timur tentu memiliki harapan besar terhadap efektivitas organisasi baru hasil penggabungan tersebut. Namun, keberhasilan restrukturisasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur formal, melainkan juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dioperasionalkan oleh aparatur serta pemimpin organisasi. Fenomena resistensi birokrasi, proses adaptasi terhadap budaya organisasi baru, serta kemampuan pimpinan dalam mengelola perubahan menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas reorganisasi. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang terjadi di dalam organisasi sangat diperlukan untuk menilai efektivitas restrukturisasi ini. Permasalahan yang muncul pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga saat ini antara lain masih terbatasnya komunikasi aktif antar pegawai sebagai dampak dari penggabungan dua instansi menjadi satu organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pekerjaan belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana inovasi, reformasi, dan pembaruan birokrasi diterapkan dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Penataan OPD ini membawa berbagai perubahan serta dampak yang signifikan bagi keberlangsungan organisasi ke depan. Dengan adanya penggabungan beberapa dinas menjadi satu, tugas dan fungsi pada dinas hasil restrukturisasi menjadi semakin kompleks dan menuntut penyesuaian yang lebih baik dari seluruh aparatur. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar mengenai proses dan dampak restrukturisasi nomenklatur birokrasi di Lampung Timur. Pertanyaan penelitian yang diajukan antara lain: Bagaimana proses penggabungan Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Lampung Timur dilakukan? Hambatan apa saja yang muncul selama implementasi restrukturisasi? Serta bagaimana pengaruh penggabungan dinas ini terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas program pemerintah daerah?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Prayogi & Kurniawan, 2024) untuk memahami secara mendalam proses restrukturisasi nomenklatur birokrasi pada penggabungan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga di Kabupaten Lampung Timur. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive* (Suriani & Jailani, 2023) dengan melibatkan pejabat struktural, staf pelaksana, serta pemangku kepentingan terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap proses penggabungan dinas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap regulasi, struktur organisasi, serta dokumen perencanaan dinas (Zahroh, 2025). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Susanto & Jailani, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika perubahan organisasi, hambatan yang muncul, serta dampaknya terhadap tata kelola birokrasi dan pelayanan publik.

C. Hasil dan Pembahasan

Restrukturisasi nomenklatur birokrasi merupakan suatu proses penataan kembali struktur organisasi pemerintahan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, penggabungan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan bentuk penyesuaian kelembagaan yang lahir dari kebijakan otonomi daerah dan tuntutan efisiensi birokrasi. Proses restrukturisasi ini tidak hanya menyangkut perubahan nama, tetapi pergantian struktur, fungsi, dan kewenangan. Menurut teori organisasi klasik, struktur organisasi harus mengikuti tujuan (*structure follows strategy*). Penggabungan dua dinas ini menandakan adanya strategi baru daerah untuk menyinergikan pengembangan sektor pariwisata dengan pembinaan kepemudaan dan olahraga. Kombinasi ini dipandang mampu mengoptimalkan potensi daerah melalui kegiatan kreatif, event olah raga, dan atraksi wisata berbasis komunitas. Kebijakan penggabungan organisasi publik juga erat kaitannya dengan teori *New Public Management* (NPM). NPM menekankan efisiensi, pengurangan tumpang tindih fungsi, dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Melalui penggabungan dinas, Pemerintah Lampung Timur diharapkan mampu mengurangi duplikasi program dan menyatukan anggaran sehingga lebih efektif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan perangkat daerah. Penataan dilakukan berdasarkan prinsip *right sizing*, yaitu ukuran organisasi harus disesuaikan dengan beban kerja. Jika beban kerja dua urusan dianggap tidak besar, penggabungan menjadi pilihan rasional untuk efisiensi.

Penggabungan nomenklatur ini memunculkan implikasi pada perubahan struktur jabatan. Jabatan struktural harus disesuaikan dengan nomenklatur baru, baik pada level kepala dinas, sekretariat dinas, maupun kepala bidang. Teori restrukturisasi kelembagaan menjelaskan bahwa perubahan struktur akan berdampak pada redistribusi kewenangan dan alur koordinasi. Teori birokrasi Max Weber juga relevan untuk dianalisis. Weber menekankan pentingnya hierarki, pembagian kerja, dan kewenangan legal-rasional. Dalam penggabungan ini, prinsip hierarki menjadi dasar pembentukan bidang-bidang baru yang mencerminkan integrasi urusan pariwisata, pemuda, dan olahraga. Penataan ini harus memastikan bahwa alur perintah tetap jelas dan tidak menimbulkan kebingungan.

Dari perspektif *Contingency Theory*, struktur organisasi harus menyesuaikan kondisi lingkungan. Lampung Timur memiliki potensi wisata yang berkembang, sementara isu kepemudaan menjadi penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, penggabungan dinas ini dapat dilihat sebagai respon adaptif terhadap dinamika pembangunan lokal. Namun demikian, penggabungan dinas tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu potensi masalah adalah terjadinya konflik peran antar-pegawai. Perubahan tupoksi dapat menciptakan ketidakpastian tugas dan menimbulkan resistensi. Hal ini sesuai dengan teori perubahan organisasi Kurt Lewin yang menyebutkan bahwa pada tahap *unfreezing*, resistensi adalah fenomena wajar. Pada tahap *changing*, organisasi harus mampu menyediakan pedoman tugas yang jelas. Pedoman ini berupa Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Dengan pedoman tersebut, perubahan dapat dilaksanakan secara terarah. Tahap terakhir dalam teori Lewin, yaitu *refreezing*, menekankan pentingnya institutionalization atau penguatan kembali struktur baru agar stabil. Pemerintah daerah harus memastikan regulasi, SOP, dan pola kerja mendukung nomenklatur baru sehingga struktur yang dibentuk dapat berfungsi optimal.

Penggabungan dinas ini juga berdampak pada perencanaan program. Dalam perspektif manajemen publik, integrasi urusan pariwisata dan kepemudaan dapat melahirkan program inovatif seperti *event sport tourism*, festival budaya berbasis komunitas pemuda, dan aktivitas kreatif yang meningkatkan daya tarik wisata daerah. Dari sisi anggaran, restrukturisasi nomenklatur dapat meningkatkan efektivitas penggunaan APBD. Anggaran yang sebelumnya terbagi pada dua dinas kini dapat disatukan sehingga lebih fokus untuk mencapai target pembangunan. Prinsip *value for money* menjadi acuan, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Selain itu, restrukturisasi nomenklatur memerlukan evaluasi beban kerja organisasi. Analisis beban kerja (ABK) digunakan untuk menentukan jumlah pegawai yang tepat pada setiap jabatan. Dengan demikian, penggabungan tidak menimbulkan kelebihan pegawai atau kekurangan pegawai. Pengaruh penggabungan juga terlihat pada aspek koordinasi antar bidang. Menurut Gulick (POSDCORB), fungsi koordinasi adalah kunci keberhasilan organisasi. Dengan nomenklatur baru, koordinasi antara bidang pariwisata dan bidang kepemudaan harus diperkuat agar program saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dampak lainnya adalah perubahan kultur organisasi. Penggabungan dua dinas dengan budaya kerja berbeda dapat menimbulkan benturan nilai. Perubahan budaya memerlukan proses internalisasi norma baru agar pegawai merasa menjadi bagian dari organisasi yang sama.

Perspektif *organizational development* menekankan pentingnya komunikasi internal selama restrukturisasi. Tanpa komunikasi, pegawai akan mengalami *role ambiguity* dan *role conflict*. Oleh sebab itu, sosialisasi perubahan menjadi langkah strategis dalam penataan kelembagaan. Dari sisi pelayanan publik, restrukturisasi diharapkan mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kualitas output program. Jika sinergi antara pariwisata dan kepemudaan berjalan baik, pelayanan publik yang berkaitan dengan event, destinasi wisata, dan pembinaan pemuda dapat meningkat. Restrukturisasi nomenklatur juga memerlukan monitoring dan evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah struktur baru berhasil mencapai indikator kinerja, seperti meningkatnya kunjungan wisata, meningkatnya partisipasi pemuda, atau meningkatnya prestasi olahraga. Pemerintah Lampung Timur perlu memastikan restrukturisasi ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kesesuaian dengan dokumen perencanaan akan memastikan bahwa setiap perubahan organisasi mendukung tujuan pembangunan daerah secara jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi melalui penggabungan dinas mampu menciptakan efisiensi kerja. Pegawai menjadi lebih disiplin dalam memanfaatkan waktu dan sumber daya, serta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas dan sistem kerja yang terkoordinasi, berbagai aktivitas operasional dinas dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat waktu. Efisiensi ini sejalan dengan tujuan reorganisasi yang ingin memperbaiki kinerja birokrasi dan mengurangi tumpang tindih tugas antar bidang. Dari sisi efektivitas, pegawai dinas menunjukkan peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Efektivitas restrukturisasi juga terlihat dari bagaimana dinas menetapkan prioritas kerja yang lebih terarah. Dengan struktur yang telah disederhanakan, penyusunan program dan anggaran menjadi lebih fokus dan terintegrasi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sinkronisasi antara rencana kerja bidang pariwisata dan bidang kepemudaan serta olahraga menjadi lebih jelas, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung seperti pembinaan komunitas pemuda berbasis destinasi wisata. Integrasi program semacam ini menunjukkan adanya peluang kolaborasi yang sebelumnya sulit diwujudkan ketika kedua dinas masih berdiri sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai merasa lebih mudah menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu karena alur kerja sudah lebih sistematis setelah penggabungan. Tanggung jawab individu juga meningkat, yang ditandai dengan ketepatan waktu dalam pelaporan, peningkatan kualitas output kerja, dan kesadaran akan pentingnya kontribusi masing-masing pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dari aspek kesejahteraan, pegawai mendapat kompensasi yang disesuaikan dengan beban tugas, kinerja, dan jabatan. Sistem penilaian kinerja berbasis laporan bulanan menjadi salah satu instrumen yang mendorong pegawai bekerja lebih profesional. Penghargaan kinerja melalui honorarium kegiatan turut memperkuat motivasi kerja, sehingga pegawai memiliki dorongan untuk bekerja lebih optimal dan bertanggung jawab. Kondisi ini berkontribusi pada terciptanya birokrasi yang lebih stabil, profesional, dan dihargai oleh masyarakat. Penggabungan dinas membawa dampak pada pola komunikasi organisasi, meski beberapa pegawai masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan struktur baru, secara umum komunikasi antarbidang mulai menunjukkan perbaikan. Koordinasi lintas fungsi, khususnya antara bidang pariwisata dan bidang kepemudaan serta olahraga, semakin intensif karena adanya kebutuhan untuk menyelaraskan perencanaan program. Peningkatan komunikasi ini menjadi faktor penting dalam mengurangi kesalahpahaman, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Proses adaptasi budaya organisasi pasca restrukturisasi memerlukan waktu. Pegawai dari dua dinas sebelumnya membawa kebiasaan kerja, rutinitas, dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Melalui observasi, terlihat bahwa proses penyesuaian ini berjalan secara bertahap melalui upaya pimpinan dalam membangun budaya kerja baru yang lebih kolaboratif. Kegiatan internal seperti rapat koordinasi rutin, pembagian peran yang lebih jelas, serta pendampingan kerja menjadi strategi penting dalam menciptakan keselarasan budaya organisasi. Adaptasi ini merupakan bagian dari dinamika alami perubahan birokrasi yang membutuhkan komitmen dan dukungan seluruh pegawai.

Restrukturisasi nomenklatur birokrasi melalui penggabungan dinas tidak hanya membawa perubahan administratif, tetapi juga perubahan perilaku organisasi secara menyeluruh. Meski masih terdapat beberapa hambatan seperti adaptasi pegawai yang berbeda-beda, keterbatasan kompetensi tertentu, serta perlunya pembenahan komunikasi internal, perubahan ini secara umum berjalan ke arah yang lebih baik. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penataan organisasi harus dibarengi dengan pembinaan SDM,

konsistensi kebijakan, serta komitmen kuat dalam membangun budaya birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, restrukturisasi nomenklatur pada penggabungan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga di Lampung Timur merupakan langkah strategis yang didasari teori organisasi, manajemen publik, dan kebijakan publik. Jika dilaksanakan secara konsisten, restrukturisasi ini diyakini dapat meningkatkan kinerja birokrasi, menciptakan efisiensi, serta mendorong percepatan pembangunan sektor pariwisata dan kepemudaan di daerah.

D. Kesimpulan

Penggabungan Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Lampung Timur berdampak positif terhadap peningkatan praktik birokrasi. Pertama, integrasi dinas mendorong terciptanya birokrasi yang lebih bersih dan transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran sehingga meminimalkan peluang terjadinya KKN. Kedua, restrukturisasi ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, di mana pegawai menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memaksimalkan waktu kerja. Ketiga, efektivitas organisasi turut meningkat melalui penerapan SOP yang lebih konsisten dan penegasan tanggung jawab kerja setiap pegawai. Keempat, birokrasi menjadi lebih produktif karena pelayanan publik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta didukung pembagian tugas yang lebih terstruktur. Terakhir, kesejahteraan pegawai tetap terjaga melalui sistem penggajian berbasis beban kerja, tanggung jawab jabatan, serta evaluasi kinerja rutin setiap bulan.

E. Referensi

- Eko, I. G., & Sri, P. (2020). *Memperkuat Peran Pemerintah Daerah : Mengelola Pariwisata Lokal*. 8(1), 1–20.
- Fitriani, Y. (2022). PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PEMBUATAN E-KTP DI Pendahuluan. *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 83–92.
- Hartati, S. (2020). PENERAPAN MODEL NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293>
- Kurniawan Andri, Herman, N. M. (n.d.). *Pelaksanaan Strategi Pengembangan Program Wisata Bono Oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan*. 43–53.
- Prayogi, A., & Kurniawan, M. A. (2024). *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah Complex*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*. 1, 30–37.
- Rahman, A. dan R. B. (2019). *PENATAAN PENGELOLAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI DYNAMIC GOVERNANCE* Abdul Rahman dan Riani Bakri. 1(1), 1–22.
- Rahman, H. (2024). REFORMASI BIROKRASI : KORUPSI DALAM. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135–161.
- Setiawan, I., Derenov, N., Arti, B., & Publik, P. (2024). *Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia*. 14(2), 234–248.
- Shoimuna, M. D. (2024). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service And Governance Journal*, 5(1).
- Suprianto, Agus Riwanto, S. U. F. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII, 134–143.
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau*. 1, 24–36.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. 1(1), 53–61.
- Wahyudi, T.; E. A. (2024). *Analisis Program Kepemudaan Berprestasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda Di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tulung agung*. 24(April), 50–63.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>
- Zahroh, N. I. (2025). *STRATEGI PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF* : 3(6), 107–118.